

Kuasa, Negara dan Masyarakat Bugis Pra-Islam

Terjemahan: Ian Caldwell (1995) *Power, state and society among the pre-Islamic Bugis. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 151(3):394-421.

Pengantar

Esai ini akan menelusuri organisasi politik masyarakat Bugis dari abad ke-14 hingga 16. Sumber-sumbernya berasal dari beragam teks historis berbahasa Bugis, yang dituliskan pada kertas Eropa abad ke-19 dan 20, menggunakan aksara pribumi berakar India, merekam informasi dari sekitar tahun 1300-an. Teks-teks ini kelihatannya disalin dari teks pada naskah yang lebih tua yang berasal dari beragam sumber lisan dan tertulis pada abad-abad lebih awal (Caldwell 1988; Pelras 1979). Di luar sumber-sumber luar yang berserakan, teks-teks ini merupakan sumber tertulis utama bagi sejarah Sulawesi Selatan sebelum datangnya orang Belanda pada awal abad ke-17, tidak lama sebelum kaum elit Bugis memeluk Islam.¹ Teks-teks ini terdiri dari Kronik (catatan resmi kerajaan), diari, silsilah elit penguasa, daftar daerah bawahan, dan karya-karya pendek dari berbagai genre, seperti legenda tentang penguasa pertama.² Beberapa di antaranya tersedia dalam bentuk terbitan yang telah menjalani proses penyuntingan dengan tambahan komentar, namun kebanyakan masih dalam bentuk naskah. Secara keseluruhan, teks-teks ini dapat memberi gambaran berarti tentang masyarakat Bugis pada masa pra-Islam.³

Nilai kesejarahan Kronik-Kronik Bugis dan teks lainnya telah diulas oleh Noorduyn (1955, 1965) dan Caldwell (1988). Sebagai sumber historis, teks-teks ini menyimpan kelebihan berarti karena mampu mencerminkan perhatian masyarakat setempat ketimbang kepentingan pengunjung-pengunjung asing. Meski demikian, akan naif juga jika menganggapnya sebagai teks yang tidak memihak; secara individual maupun kolektif teks-teks ini membeberkan klaim terhadap sejarah dan leluhur untuk memperkuat legitimasi kekuasaan atau sebuah kelas penguasa. Di tengah-tengah klaim inilah terletak hubungan penting antara kepemimpinan politik dan status ‘askriptif’, yakni status yang diperoleh seseorang dari orang tuanya begitu lahir. Esai ini berupaya melukiskan bahwa hubungan ini merupakan unsur inti dalam memahami sistem politik Bugis, dan dalam membaca teks-teks historis Bugis.

¹ Para mualim Cina agaknya tidak mengetahui keberadaan Sulawesi sebelum abad ke-17 (Mills 1974). Ekspedisi Belanda pertama tiba di Sulawesi tahun 1605 dan para penguasa kerajaan-kerajaan besar Bugis memeluk Islam antara tahun 1605 hingga 1611. Satu-satunya sumber Eropa untuk masa pra-Islam adalah catatan yang ditinggalkan beberapa pengunjung Portugis pada abad ke-16, yang kebanyakan hanya mencakup sebagian kecil wilayah di pantai barat antara tahun 1542-1547. Kecilnya informasi yang bisa diperoleh dari sumber ini tidak dapat dihubungkan dengan sumber-sumber lokal, begitu juga dengan bentuk geografis semenanjung ini (Pelras 1977). Terdapat banyak laporan Belanda untuk abad ke-17 dan setelahnya.

² Bukti-bukti perkembangan tulisan di sekitar tahun 1400 dan masalah-masalah dalam menggunakan teks Bugis sebagai sumber Sejarah dibahas dalam disertasi penulis (Caldwell 1988).

³ Situasi sebanding muncul pada masyarakat Makassar pra-Islam, yang dikaji secara rinci dalam disertasi David Bulbeck (Bulbeck 1992).

Penelitian arkeologi terbaru oleh David Bulbeck, Bahru Kaluppa dan yang lain, telah cukup banyak menambah pengetahuan kita tentang masa pra-Islam di Sulawesi Selatan. Kebanyakan dari penelitian ini bersandar pada analisis statistik terhadap puing keramik yang dikumpulkan dari permukaan bekas tempat tinggal atau pada situs-situs ritual. Lewat analisis ini kita dapat mengkonstruksi sejarah kependudukan dari populasi yang bermukim pada daerah-daerah yang diteliti, yakni di daerah-daerah bekas kerajaan Bugis dan Makassar, Sulawesi Selatan, selama masa beberapa ratus tahun. Fluktuasi jumlah penduduk, sebagian karena perpindahan penduduk, terkadang dapat dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa, dan bahkan dengan tindakan seseorang, yang tercatat dalam Kronik dan silsilah Sulawesi Selatan. Meski artikel ini berkonsentrasi pada sumber-sumber tertulis, sesekali temuan-temuan arkeologis juga akan digunakan.

Kerajaan-Kerajaan

Dari masa historis terawal, daerah dataran rendah Sulawesi Selatan telah terbagi ke dalam unit-unit politik dan teritorial yang oleh para sejarawan disebut sebagai ‘kerajaan’, dan kadang ‘konfederasi’. Enam kerajaan besar, Luwuq, Soppeng, Sidenreng, Bone, Wajoq, Goa dan Tallo muncul pada teks-teks Bugis dan Makassar yang merujuk pada periode abad ke-15 (lihat Gmabar 1). Kendati demikian, sebaiknya kita tidak langsung berasumsi bahwa perbatasan kerajaan-kerajaan ini sama dengan tapal batas kerajaan-kerajaan bernama sama pada abad ke-17,⁴ atau bahwa penguasa mereka mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan bangsawan Eropa sezaman. Dalam esai ini, kata ‘kerajaan’ merujuk pada salah satu dari sekitar selusin konfederasi tradisional Bugis dan Makassar, masing-masing mengakui seorang bangsawan tertinggi dengan berbagai macam gelar yang kekuasaannya membentang, meski secara nominal, di dalam wilayah konfederasi itu. Akan dipaparkan bahwa konfederasi ini mempunyai struktur politik berlapis tiga, yang saya namakan ‘kerajaan’, ‘domain’, dan ‘pemukiman’.

Pembagian dataran rendah Sulawesi Selatan ke dalam kerajaan dulunya (hingga kini) merupakan prinsip penting pengelompokan historigrafi Bugis dan Makassar. Setiap Kronik Bugis maupun Makassar terbentuk di seputar silsilah bangsawan tertinggi sebuah kerajaan (selanjutnya disebut dengan istilah ‘penguasa’). Silsilah ini memuat kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kerajaan, atau kejadian eksternal yang mempengaruhinya.⁵ Sebagian teks merujuk langsung pada daerah bawaan kerajaan itu, namun secara umum elit penguasalah yang menjadi pemeran utama historiografi Bugis dan Makassar. Kaum kebanyakan Bugis dan Makassar jarang disebutkan, atau hanya jika berhubungan dengan penguasa mereka.

⁴ Sumber-sumber Eropa abad ke-17 memperlihatkan bahwa kerajaan-kerajaan besar menempati daerah yang agak sama dengan kabupaten di masa kini yang namanya sama dengan kerajaan tersebut.

⁵ Banyak silsilah Bugis dan Makassar yang masih bertahan tidak berpusat pada sebuah kerajaan tetapi pada sekelompok kerabat dari seorang individu yang hidup pada masa itu. Silsilah ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan individu ini dengan leluhur ternama dari domain atau kerajaan lain, dan dapat amat membantu untuk melakukan *cross-check* terhadap silsilah Kronik.

Kemungkinan besar jenis teks Bugis dan Makassar yang terbanyak adalah silsilah. Silsilah mencatat keturunan dan perkawinan pertama seseorang. Perkawinan ini mengandung makna historis yang berarti. Seorang bangsawan Bugis dan Makassar biasanya kawin lebih dari sekali, namun yang paling penting adalah perkawinan pertamanya. Perkawinan ini diatur oleh kerabatnya dengan tujuan menciptakan atau memperkuat ikatan dengan keluarga bangsawan lain. Dari kajian tentang perkawinan ini kita dapat mengidentifikasi beberapa maksud politik di balik negosiasi mereka.

Bukti-bukti tentang perkawinan pada silsilah bagian pra-Islam menyiratkan bahwa pada abad ke-15 dan 16, kesatuan di dalam kerajaan lebih penting daripada hubungan antar kerajaan. Perkawinan dinegosiasikan bukan antara dua penguasa, namun antara seorang penguasa dengan *arung* bawahannya. Ambil contoh, perkawinan tipikal abad ke-15 antara penguasa Soppeng, La Makkanengnga, dengan We Tena, putri *arung* Bulumatanre, sebuah pemukiman berbenteng di pegunungan yang menguasai jalur dari pedalaman Soppeng ke pantai barat. Silsilah penguasa Soppeng⁶, di mana perkawinan ini tertera, juga mencatat perkawinan lain di Balusu, Leworeng, Baringeng, Pising, Marioriawa, Lompengeng, Ujumpulu, Ganra, Tellarie, Citta, dan Pattojo. Kecuali satu, seluruh pemukiman ini, pada naskah lain⁷, termasuk dalam daftar daerah bawahan [*vassal*]⁸ Soppeng, dan semuanya, kecuali Baringeng, berada dalam wilayah Kabupaten Soppeng kini.⁹ Perkawinan antar kerajaan jarang terjadi.¹⁰ Silsilah bangsawan tinggi Soppeng yang disebut di atas hanya menuliskan satu perkawinan seperti ini pada awal abad ke-14, antara penguasa Soppeng yang pertama tercatat, La Temmammala, dan seorang putri Suppaq, sebuah kerajaan pantai di dekat Parepare.¹¹

Pentingnya penyebutan nama sebuah pemukiman di dalam silsilah penguasa kerajaan berseberangan dengan derajat sentralisasi politik dan administratif, yang umumnya di berada bawah satu pemerintahan atau konstitusi, yang merupakan karakterisasi sebuah negara menurut para ilmuwan politik (Skinner 1989). Selain itu, sebuah negara diharapkan mempunyai birokrasi administratif, yang hanya sedikit kita temukan buktinya dalam catatan sejarah pra-Islam Sulawesi Selatan: jarang sekali sumber-sumber Bugis menyebutkan sebuah jabatan yang berdasar pada fungsi

⁶ MS. NBG 99:224-30, dalam koleksi naskah Bugis dan Makassar di Nederlands Bijbelgenootschap (Masyarakat Injil Belanda), tersimpan di Perpustakaan Universitas Negeri di Leiden. Penomoran naskah ini berasal dari Matthes 1875.

⁷ MS. NBG 101:133-4.

⁸ *Vassal* [daerah bawahan] adalah terjemahan konvensional dari istilah Bugis *palili*, ‘sesuatu di seputar bagian tengah’.

⁹ Tellarie tidak teridentifikasi.

¹⁰ Pengecualian dari pola ini adalah Ajatappareng, sebuah konfederasi dari lima kerajaan terletak di dataran tengah semenanjung yang subur, kini antara Parepare dan Sidenreng. Silsilah dari kerajaan-kerajaan ini memperlihatkan banyaknya kawin-mawin antara keluarga penguasa kerajaan sejak tahun 1500 dan seterusnya (Mukhlis 1985: 119).

¹¹ Kejadian perkawinan seperti ini lebih sering terjadi pada naskah silsilah yang sama di bagian pasca-Islam, khususnya mengikuti peristiwa-peristiwa kerusuhan pada abad ke-17, memperlihatkan bahwa hal ini bukan stilistika atau konvensi teks.

administratif dan bukan berdasarkan tempat. Juga tidak ada penekanan pada modal, atau pusat-pusat istana sebuah kerajaan; silsilah penguasa Soppeng, misalnya, bahkan tidak menyebutkan Tinco, di mana bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa penguasa-penguasa pra-Islam membangun istananya di sana (Bahru Kaluppa dkk. 1989: 48). Ciri ini mengisyaratkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Islam kurang terpusat dan bahwa pemukiman yang terekam dalam silsilah kemungkinan merupakan unit politik yang berdiri sendiri.

Hipotesis ini didukung oleh daftar daerah-daerah bawahan Soppeng.¹² Daftar ini membagi daerah-daerah bawahan Soppeng ke dalam dua kelompok (mengenai status mereka akan dibahas kemudian) yang dipilah dengan ungkapan *napanoqe rakkalana Soppeng*, ‘di bawah bajak Soppeng’.¹³ Ungkapan ini tidak berlaku pada kelompok pertama yang terletak jauh dari ibukota Soppeng masa kini Watansoppeng: yang terdekat, Apanang, jaraknya 10 km, sementara Lamuru berjarak 56 km. Wilayah yang dicakup oleh pemukiman-pemukiman ini bersesuaian dengan wilayah Kerajaan Soppeng dulu. Selain itu, dua belas dari pemukiman ini—Lamuru, Mario, Patojo, Citta, Goagoa, Ujumpulu, Lompengeng, Baringeng, Tanatengnga, Marioriawa, Ampungeng, dan Kirukiru—juga punya daftar daerah bawahan.¹⁴ Dari daftar ini kita jadi tahu bahwa setiap dari dua belas pemukiman ini juga mempunyai sekumpulan pemukiman yang menjadi daerah bawahannya, beberapa di antaranya masih tertera pada peta modern. Karena itu, masing-masing dari dua belas pemukiman ini, bersama dengan pemukiman yang merupakan daerah bawahannya dan wilayah-wilayah yang berasosiasi, merupakan sebuah unit teritorial, yang dapat kita sebut domain atau perkauman. Agaknya cukup beralasan untuk bersumsi bahwa seluruh daerah bawahan Soppeng yang berjumlah 28 mempunyai struktur yang sama, dan bahwa daftar daerah bawahan yang tersisa, yaitu 16 buah, telah hilang atau belum teridentifikasi.

Setelah menetapkan asumsi ini, sekarang kita mempunyai gambaran Soppeng yang terdiri dari 28 domain, masing-masing terbentuk dari selusin atau lebih pemukiman dan daerah-daerah yang berasosiasi dan sebuah pemukiman menjadi pusat. Tapi di manakah ibukota atau istana Soppeng? Inilah yang terekam pada paruh kedua daftar daerah bawahan. Di sini disebutkan 35 pemukiman, masing-masing kini terletak di dekat Ibukota Kabupaten Soppeng masa kini, Watansoppeng, yang terdekat berjarak 1 km. Pemukiman-pemukiman inilah yang membentuk domain pusat Soppeng, yang pada abad ke-16 terpusat di Laleng Bata (‘di dalam dinding istana’), yang kini berada di Watansoppeng (Bahru Kaluppa dll. 1989: 71). Karena itu, ungkapan *napanoqe rakkalana*, ‘di bawah bajak [Soppeng]’, dapat ditafsirkan menjadi ‘pemukiman-pemukiman berikut ini diperintah langsung oleh domain pusat Soppeng’.

¹² MS. NBG 101:113-4

¹³ Secara harfiah berarti: ‘maka diturunkanlah bajak milik Soppeng’

¹⁴ MS. NBG 101: 134-5

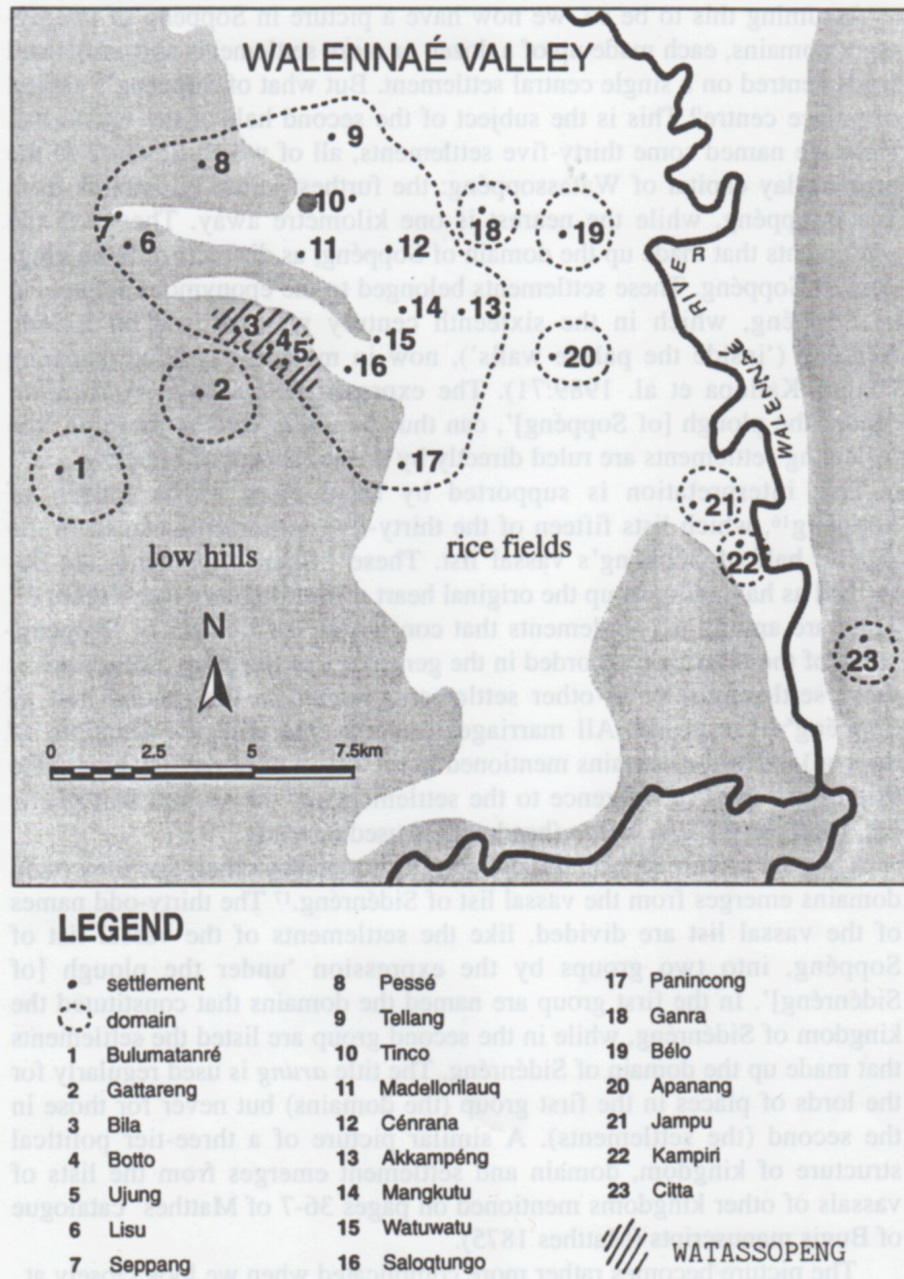


Figure 2. The domain of Soppéng and its neighbouring domains.

Tafsiran ini didukung oleh sejarah asal-usul Soppeng,¹⁵ yang menuliskan 15 dari 35 pemukiman pada paruh ke dua daftar daerah-daerah bawahan Soppeng. Lima belas pemukiman ini digambarkan sebagai pembentuk jantung kerajaan ini (lihat Gambar 2). Pemukiman inilah di antaranya yang membentuk domain Soppeng. Tidak ada pernikahan yang tercatat pada silsilah penguasa Soppeng berlangsung di pemukiman ini, atau di pemukiman lain yang disebutkan di paruh ke dua daftar daerah bawahan Soppeng. Seluruh pernikahan (kecuali dengan Kerajaan Suppa) berlangsung di domain-domain yang disebutkan pada paruh pertama daftar itu. Gelar *arung* juga tidak digunakan pada pemukiman-pemukiman di paruh ke dua daftar; untuk mereka digunakan gelar *matoa* (ketua).

Gambaran serupa tentang domain pusat yang dikelilingi oleh domain lain yang lebih kurang penting, juga terekam pada daftar daerah-daerah bawahan Sidenreng.¹⁶ Sekitar 30 nama daerah bawahan dibagi, sebagaimana pada daftar daerah bawahan di Soppeng, menjadi dua kelompok dengan ungkapan ‘di bawah bajak [Sidenreng]’. Kelompok pertama disebut sebagai domain yang membentuk Kerajaan Sidenreng, sementara kelompok ke dua adalah pemukiman-pemukiman yang membentuk domain Sidenreng. Gelar *arung* digunakan secara teratur untuk penguasa di kelompok pertama (kelompok domain) namun sama sekali tidak dipakai pada kelompok ke dua (kelompok pemukiman). Gambaran serupa tentang struktur politik yang berlapis tiga, yakni kerajaan, domain, dan pemukiman, juga terlihat pada daftar daerah bawahan di kerajaan-kerajaan lain yang tertulis pada Katalog Manuskrip Bugis, halaman 36-37 (Matthes 1875).

Gambaran ini menjadi sedikit lebih rumit jika kita melihat lebih dekat daftar daerah bawahan dari domain-domain pembentuk Soppeng. Daftar daerah bawahan domain Lamuru¹⁷ mencatat 28 pemukiman, yang terbagi menjadi dua kelompok, dipisahkan dengan ungkapan ‘di bawah bajak [Lamuru]’. Kelompok pertama terdiri dari domain Lamuru dan kelompok ke dua terdiri dari pemukiman-pemukiman yang membentuk domain pusat yang menjadi nama domain tersebut. Daftar daerah bawahan Marioriawa juga terpilah dua, yang pertama terdiri atas lima domain bawahan, dan yang kedua terdiri dari 15 pemukiman yang membentuk domain pusat. Dari sini dapat terlihat bahwa daftar daerah bawahan Lamuru dan Marioriawa mencerminkan keberadaan tiga lapis struktur politik, sebagaimana daftar daerah bawahan Soppeng dan kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Lamuru dan Marioriawa dapat dianggap sebagai kerajaan kecil, karena masing-masing mempunyai domain, sementara Soppeng

¹⁵ MS. MAK 188:5-7 dalam koleksi naskah Bugis dan Makassar pada bekas Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Ujung Pandang. Koleksi ini, yang kini tertinggal sebagian saja, di-mikrofilm-kan pada tahun 1972 oleh Dr. C.C. Macknight. Salinan mikrofilm ini disimpan di Perpustakaan Australian National University dan Universitas Negeri Leiden. Nomor catalog ada pada mikrofilm.

¹⁶ MS. NBG 112:59

¹⁷ MS. NBG 101: 134.

kelihatannya menjadi sebuah ‘Kerajaan super’ yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil dan domain-domain.¹⁸

Struktur politik Soppeng dapat dibandingkan dengan Sriwijaya (Hall 1976). Kerajaan atau ‘kekaisaran’ Sriwijaya diperintah melalui sejumlah ketua distrik (*datu*), masing-masing memerintah domainnya sendiri: hanya pusat kerajaan yang diperintah langsung oleh raja. Setiap domain bawahan Sriwijaya sejatinya merupakan unit-unit yang berdiri sendiri yang kemudian tertarik atau terpaksa bergabung dengan domain pusat di Palembang. Domain-domain ini senantiasa memegang independensi yang luas, yang diimbangi oleh ikatan kesetiaan tradisional dan hubungan ekonomis di dalam kerajaan. Domain-domain ini menyatu menjadi kerajaan dengan berbagai cara, termasuk penunjukan langsung putra-putra raja menjadi kepala distrik (Hall 1976: 75).

Di Sulawesi Selatan, salah satu strategi yang digunakan para penguasa untuk memperoleh integrasi lebih besar di dalam kerajaan adalah dengan menikahkan putra-putra atau putri-putri mereka dengan anak *arung* setempat. Dalam Kronik Bone, tertulis bahwa pernikahan penguasa ke-3 Bone ‘diatur untuk menikah dengan sepupu sekalnya, We Tenrirompong, putri dan pewaris tahta *arung* Pacing’ (sebuah domain di Bone) (Macknight dan Mukhlis, belum terbit). Silsilah penguasa Soppeng memaparkan bahwa La Makkanengnga, putra seorang penguasa Soppeng di awal abad ke-14, menikah di Bulumatanre, sebuah domain yang secara strategis penting. Beberapa pernikahan putri penguasa dengan putra *arung* setempat juga dicatat.¹⁹ Sulit untuk mengukur sejauh mana seorang penguasa mengendalikan domain-domain dalam kerajaan melalui pernikahan seperti itu, namun hasilnya: keluarga penguasa kerajaan senantiasa punya ikatan erat dengan keluarga penguasa domainnya.²⁰

Pada abad ke-14, ketika catatan historis mulai ada, Luwuq dan Soppeng, yang ke dua berada di bawah kepemimpinan ganda (Bahru Kaluppa dkk. 1989: 69-70), merupakan kekuatan-kekuatan dominan di wilayah masing-masing. Bukti-bukti arkeologis dari Soppeng mendukung gambaran yang diperoleh dari teks-teks Bugis milik sebuah kerajaan besar yang berpusat di bukit Tinco, 8 km di utara Watansoppeng (Bahru Kaluppa dkk. 1989: 48). Paling tidak sejak 1300, Soppeng melakukan perdagangan dengan bagian lain Nusantara, mungkin melalui pelabuhan Suppaq di pantai barat. Pada abad ke-15, Sidenreng juga berada di bawah pengaruh Soppeng: seorang penguasa awal

¹⁸ Dalam daftar daerah bawahan Sidenreng terdapat bukti keberadaan hierarki di antara domain-domain Sidenreng, yang dibagi menjadi beberapa tempat di dalam daftar dengan ungkapan *dua [tella] arung deq masala*, yang kemungkinan bermakna ‘dua (atau tiga) penguasa yang setingkat’. Relevansi ungkapan ini tidak jelas.

¹⁹ Silsilah hulu lembah Sungai Cenrana (MS. NBG 99: 144-5) juga memperlihatkan catatan serupa tentang pernikahan pusat-domain, namun upaya menafsirkannya terhalang oleh kurangnya penyebutan nama kerajaan yang kita kenal.

²⁰ Kebijakan integrasi melalui perkawinan strategis juga berlaku di kerajaan. Reid menyebutkan bagaimana dualisme kerajaan Goa dan Talloq menjadi dipertanyakan menyusul dinobatkannya Tunipasuluq sebagai raja Goa, karena dia dapat mengklaim sebagai penguasa Talloq dari garis ibunya dan Goa dari ayahnya (Reid 1983: 136).

Soppeng dilaporkan telah memerintahkan rakyat Sidenreng, Nepo, dan Marioriawa²¹ untuk mengolah lahan di sekitar pantai danau di tengah-tengah semenanjung. Di awal abad ke-16, Sidenreng telah menjadi kekuatan dominan di utara danau: silsilah raja-raja Soppeng dan Suppaq²² merekam peralihan persekutuan Kerajaan Suppaq dari pengaruh kekuasaan Soppeng ke Kerajaan Sidenreng di sekitar tahun 1425.²³ Dua kerajaan Bugis lainnya, Bone dan Wajoq, dan kerajaan Makassar, Goa dan Tallo, agaknya belum mempunyai kekuatan besar hingga abad ke-16, meski kebangkitan mereka dapat ditelusuri hingga sekitar tahun 1400. Kita bahkan dapat menjejaki pertumbuhan Kerajaan Bone dari sebuah domain kecil dengan nama yang sama hingga awal tahun 1400-an (Macknight 1983).

Asal-usul proses penyatuan ini, di mana satu domain muncul sebagai pusat politik di tiap kerajaan, sebagian besar tak nampak pada sumber-sumber tertulis. Kendati demikian, tidak sulit membayangkan bahwa, digerakkan oleh meningkatnya populasi dan mungkin juga perkembangan teknik pertanian, domain-domain awal semakin bersaing untuk memperoleh kendali atas dataran-dataran subur dan lembah-lembah di semenanjung ini. Persaingan ini bisa jadi merupakan salah satu faktor yang merangsang integrasi bertahap domain-domain yang tercerai-berai menjadi satu unit, kemungkinan besar melalui sejumlah persekutuan pertahanan yang menawarkan perlindungan fisik kepada anggota-anggotanya.

Dengan pengecualian Luwuq, munculnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi-Selatan sebagian besar tidak berhubungan dengan teknologi dan gagasan luar. Tidak seperti masyarakat melek huruf lain di Indonesia yang belum mengalami kontak dengan Eropa, Sulawesi Selatan berkembang sebagian besar tanpa pengaruh gagasan-gagasan India, dan sejumlah kecil elemen India yang ditemukan hanya bersifat dipermukaan dan kurang terasimilasi.²⁴ Indianisasi didefinisikan oleh Coedes sebagai ekspansi sebuah budaya terorganisir yang terbentuk oleh konsepsi India tentang kerajaan yang terlihat pada cara pemujaan Hindu atau Buddha, mitologi purana, pemberlakuan teks-teks hukum India, dan penggunaan bahasa Sansakerta. Transmisi kedua elemen awal menggunakan elemen yang terakhir. Coedes menambahkan: 'Atas alasan inilah kita terkadang menyebutkan "Sanskritisasi" dan bukan "Indianisasi"' (Coedes 1968: 15-6). Tidak terdapat bukti keberadaan ciri-ciri ini di Sulawesi Selatan. Tidak seperti di Jawa, Sulawesi Selatan tidak

²¹ Nepo dan Marioriawa terletak di sebelah barat dan selatan Danau Tempe dan merupakan domain Soppeng.

²² MS. MAK 119:66.

²³ Seorang pendatang Portugis, Manuel Pinto, mengaku tinggal selama delapan bulan sebagai tamu penguasa Sidenreng pada pertengahan tahun 1540-an. Pinto menggambarkan dia sebagai 'seorang penguasa yang amat besar, yang digelar *emperador* [...] Dia tinggal lima atau enam *leagues* di pedalaman pada negeri bernama Sedemre. Dia berkuasa atas hampir seluruh rakyat di wilayah ini' (Schurhammer 1980: 628).

²⁴ Elemen-elemen India ini termasuk nama bulan di bahasa Bugis, nama spesialis ritual pra-Islam (*bissu*), elemen-elemen ritual dan kosmologi proses produksi padi, penggunaan gelar Jawa-Sanskerta oleh penguasa Luwuq abad ke-15 dan 16, desain-desain ornament tertentu pada kuburan raja-raja dan alat perang, dan bentuk senjata ritual tertentu.

punya arsitektur monumental atau versi bahasa orang kebanyakan dari karya-karya sastra dan filsafat India. Ramayana, Mahabharata, dan sastra besar India lainnya tidak dikenal di Sulawesi Selatan pra-kolonial. Juga tidak terdapat gaya historis India, dengan penekanan pada mitos, legenda, dan simbol, yang tercermin pada Kronik dan catatan sejarah Sulawesi Selatan. Kata pinjaman dari bahasa Sansakerta dalam bahasa Bugis dan Makassar sangat terbatas dibandingkan dengan bahasa Jawa dan Malayu, dan diperoleh kebanyakan melalui kontak dengan bahasa Malayu (Gonda 1952: 38-45). Prasasti tidak dikenal, dan gagasan India tentang *cakravartin* (penguasa dunia) tidak berakar di Sulawesi Selatan. Kemungkinan, argumen paling meyakinkan akan kurangnya Indianisasi adalah tulisan, sebuah prasyarat bagi penyebaran dan adaptasi gagasan-gagasan India secara efektif (sebagaimana terlihat pada dekatnya hubungan asal tulisan dan Indianisasi di masyarakat Asia Tenggara lainnya), yang tidak berkembang di Sulawesi Selatan hingga sekitar tahun 1400, paling tidak seratus tahun setelah munculnya kerajaan pertama (Caldwell 1988: 171).

Elit penguasa

Dari Kronik dan silsilah jelas terlihat bahwa kekuasaan politik di masing-masing kerajaan berasosiasi dengan sebuah kelompok keluarga terbatas yang berstatus sangat tinggi. Penguasa dipilih dari kelompok kerabat ini dan biasanya putra, atau kadang putri, dari penguasa sebelumnya, atau anak dari saudara laki-laki atau perempuan sang penguasa. Suksesi reguler jabatan politis di dalam keluarga penguasa di berbagai kerajaan memperlihatkan berlakunya sebuah ideologi kekuasaan di mana kepantasan untuk memperoleh jabatan politik berdasarkan status kelahiran (askriptif), bukan pencapaian. Dalam kerangka ideologi ini, kualitas personal yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin merupakan hasil, bukan sebab, dari status seseorang. Dalam pemikiran orang Bugis, status tidak berasal dari kekuasaan, melainkan kekuasaan berasal dari status.

Anehnya, pencapaian individual kemungkinan besar memainkan peran penting dalam pemilihan seorang penguasa. Secara umum, penelusuran garis keturunan di Sulawesi Selatan bersifat bilateral, dan dapat terbaca dari silsilah bahwa setiap anak penguasa, laki-laki atau perempuan, anak pertama atau terakhir, dapat menggantikannya, meski dalam kenyataan biasanya terpilih anak laki-laki. Kemungkinan besar juga seorang individu dapat atau memang terangkat statusnya karena kualitas pribadi atau pencapaian—karir penguasa Bone abad ke-17, La Tenritatta, adalah sebuah contoh jelas (Andaya 1981)—namun kemungkinan peningkatan status seperti itu dianggap sebagai sebuah ‘pengakuan’ atas status mereka, bukannya perolehan status.²⁵ Millar memperlihatkan bagaimana di masyarakat Bugis masa kini, status kelahiran disesuaikan dengan pencapaian personal seseorang—atau jika tidak memilikinya—dalam upacara

²⁵ La Tenritatta lahir dari keluarga bangsawan rendah penguasa domain Palakka. Silsilahnya, yang tentu saja dibuat setelah di menjadi penguasa puncak Sulawesi Selatan, menelusuri nenek-moyangnya melalui ayah hingga tiba ke Simpursia, penguasa perama Luwu yang bersifat legenda (Caldwell 1988: 98).

pernikahan Bugis. Penyesuaian ini diupayakan dengan melakukan ‘penjejukan ulang’ secara komunal status kelahiran keluarga kedua mempelai di berbagai tingkatan upacara pernikahan, karena itu menunjukkan adanya penjajaran antara sistem ideologi dengan kenyataan sehari-hari kekuasaan (Millar 1989: Ch. 1). Kaum wanita, yang secara teoritis tidak boleh menikah dengan pria berstatus lebih rendah, bertindak sebagai penanda tingkatan status kerabatnya. Situasi serupa terjadi di masyarakat Makassar masa kini, menurut Chabot, yang menulis:

‘[...] status sosial di Sulawesi Selatan utamanya menandakan kemungkinan seseorang untuk menikah. Sebuah pernikahan adalah ungkapan status yang diperoleh pada saat itu.’ (Chabot 1950: 82.)²⁶

‘[...] wanita adalah, sebagaimana dulunya, ukuran dari nilai status kelompoknya’ (Chabot 1950: 91).

‘Diyakini bahwa kaum lelaki harus terus meningkat, dan bahwa wanita hanya harus menjaga diri agar tidak terjatuh.’ (Chabot 1950: 94.)

‘Anak-anak dari pernikahan seperti itu [antara rekanan dari tingkatan sosial berbeda], sekalipun perbedaan level di antara orang tua mereka cukup besar, secara resmi dianggap sederajat di dalam kelompok kerabat ibunya, karena orang begitu percaya pada gagasan bahwa seorang wanita tidak boleh jatuh [dalam status sosial].’ (Chabot 1950: 96.)

Dalam analisis statistiknya tentang gelar di Makassar pada abad ke-16 dan 17, Bulbeck menemukan korelasi yang tinggi antara gelar saudara perempuan seibu seapak, yang mengisyaratkan tegasnya status askriptif para aristokrat wanita Makassar (Bulbeck 1992: 101).

Pentingnya status askriptif dalam pemilihan seorang penguasa Bugis dengan anggun tersurat pada Kronik Bone, tentang asal-usul dan penobatan *Arumpone* (penguasa pemukiman dan Kerajaan Bone) ke tiga.

‘Dia [Arumpone ke dua, La Umasaq] tidak punya anak pewaris tahta, meski dia, kenyataannya, adalah ayah To Sualeng dan To Salawakeng, namun ibu mereka hanyalah orang kebanyakan. Ketika dia tahu saudara perempuannya, yang menikah di Palakka, hamil, dia pergi tidur, dan disebutkan bahwa dia diperlihatkan apa yang harus dia lakukan. Setelah itu hatinya menjadi tenang karena dia tahu bahwa saudara perempuannya, yang menikah di Palakka, akan

²⁶ Terjemahan bahasa Inggris oleh R. Neuse (Human relation Area Files, 1950).

melahirkan. Dia memanggil To Sualleng dan To Salawakeng dan mengatakan, “Sekarang cepatlah pergi ke barat menuju Palakka, karena adik saya katanya akan melahirkan. Jika adik saya telah melahirkan, ambil saja bayinya simpan di dalam kantong, peluk erat-erat, bawa cepat ke timur, ke sini. Karena tali pusarnya akan dipotong di sini, dan akan dicuci di sini.”

To Sualleng dan To Salawakeng melakukannya dengan cepat. Mereka tiba di Palakka, langsung menuju ke istana. To Sualleng dan To Salawakeng bahkan tidak sempat duduk. Isteri penguasa Palakka melahirkan, dan bayinya laki-laki. Rambutnya tegak berdiri. To Sualleng langsung ke kamar dan mengambil bayi itu, membungkusnya dengan kantong dari kain kasar, dia lalu memeluknya erat dalam sarung terlipat, lalu berangkat ke timur menuju Bone. Namun raja Palakka tidak ada waktu bayinya dibawa.

Ketika mereka tiba di Bone, mereka langsung naik ke rumah raja. Setelah itu tali pusar (bayi) dipotong, setelah itu juga, dia mencucinya [...] Malam itu juga sebuah titah dikeluarkan untuk seluruh rakyat Bone, yaitu: “Berkumpullah besok, bawa senjata”.

Besoknya, pagi-pagi sekali, berkumpullah orang Bone lengkap dengan senjatanya. Worompong [bendera kerajaan] dikibarkan. Arumpone turun ke tempat pertemuan. Arumpone berkata: “Untuk inilah, saya mengumpulkan kalian semua rakyat Bone. Inilah anak saya La Saliwu dan diberi gelar Kerrampeluq. Kepada saya akan serahkan tahta Bone. Lewat anak ini pula, saya menegaskan perjanjian Yang Mulia [Arumpone pertama], sebelum menghilang, yang beliau percayakan pada saya.”

Seluruh rakyat Bone memberi persetujuan dan setelah itu bersumpah setia, dan perintah juga diberikan kepada para dukun. [...] Yang Mulia Kerrameluaq dinobatkan oleh pamannya selama tujuh hari dan tujuh malam [...] Ketika tembungnya di bawa mengelilingi rumah, Yang Mulia, yang tua, turun dari istana.’ (Macknight and Mukhlis, belum terbit).

Catatan ini memperlihatkan dua prinsip penting. Pertama, bahwa status seseorang secara esensial ditentukan oleh status ibunya²⁷, dan kedua, kekuasaan di Bone hanya boleh dipegang oleh mereka yang berstatus askriptif yang tinggi. Isteri La Umasaq adalah orang kebanyakan, maka putra-putranya berstatus lebih rendah daripada dia, dan rendahnya status ini menyisihkan mereka dari suksesi. Sebaliknya, saudara perempuan La Umasa berstatus askriptif sama dengan dia. Karena itu La Umasa menculik anak saudaranya dan menobatkannya menjadi Arumpone. Sebagaimana dijelaskan Kronik ini, tidak satupun putra La Umasa yang diterima sebagai penguasa oleh *arung* Bone.

²⁷ Bandingkan dengan Chabot 1950: 96 di atas.

Seberapa jauh prinsip ini berlaku dalam kenyataan, itu sulit ditentukan. Keserakahan, ambisi, dan kekerasan kemungkinan besar memainkan peran besar sebagaimana di masyarakat lain, dan bukti-bukti akan hal itu tidak sulit ditemukan pada sumber-sumber Sulawesi Selatan. Selain mengguratkan setumpuk bukti tentang eratnya hubungan status askriptif dan penunjukan untuk jabatan tinggi, harus juga dicamkan bahwa hubungan ini merupakan pesan utama kronik itu sendiri. Setiap Kronik berkepentingan untuk menampakkan asal-usul raja (biasanya melalui kontrak sosial antara mahluk turunan dari dunia atas dan rakyat sebuah kerajaan) dan peralihan kekuasaan yang pantas ke generasi-generasi berikutnya. Singkatnya, jika ada orang yang menyelusup demi merebut tahta kerajaan, kita akan disuguhi dengan pencapaiannya, didukung dengan syarat silsilah yang pantas untuk memperoleh status tingginya. Berlawanan dengan argumen itu, kita diperhadapkan pada fakta bahwa persebaran silsilah yang luas di dalam dan di antara kerajaan akan menyulitkan upaya pemalsuan status.²⁸ Karena itu, kita akan cenderung percaya bahwa Kronik-Kronik ini mengatakan yang sebenarnya, atau sesuatu yang mendekati kebenaran.

Yang pasti bahwa gagasan tentang status bertalian dengan kesuburan pertanian, dan bahwa sumber utama dari kesuburan ini bersifat supranatural. Rujukan tentang hubungan antara status dan kesuburan bersebar di sumber-sumber Bugis. Sejarah asal-usul Soppeng melukiskan bagaimana rakyat Soppeng, yang dipimpin oleh kepalanya, meminta *tomanurung* (mahluk yang turun dari dunia atas) dari Sekkanyili untuk menjadi penguasa mereka.

‘Maka 60 ketua berangkat. Ketika mereka bertemu dengan tomanurung, ketua masyarakat Ujung, Botto, dan Bila berkata, “Kami datang ke sini, Hai yang terberkati, untuk mengasihani [kami]. Jangan menghilang. Kami menjadikan anda tuan kami. Anda melindungi tanaman kami dari burung sehingga kami tidak kekurangan makanan. Anda menutupi kami sehingga tidak kedinginan. Anda mengikat padi kami sehingga kami tidak kosong dan anda memimpin kami jauh atau dekat. Jika anda menolak isteri dan anak kami, kami juga akan menolak mereka.”’

Pertalian erat status dan kesuburan pertanian juga terekam pada Kronik Tanete, sebuah kerajaan kecil di pantai barat. Kronik ini menceritakan bagaimana setelah meninggalnya penguasa pertama, seorang bangsawan dari kerajaan tetangga, Segeri, yang juga adalah seorang kepala distrik kecil, dinobatkan.

‘Tidak ada *arung* di Agangnionjo. Maka Puang Lolo [kepala distrik Ujung] dipilih menjadi penguasa; dia menyebut dirinya *arung*; maka rakyat pun

²⁸ Akurasi catatan silsilah dari sekitar tahun 1400 telah diuji lewat rujuk-silang yang dapat diberlakukan pada sejumlah karya Bugis (Caldwell 1988: 169).

mengangkatnya sebagai Datu Gollae [“Tuan yang manis”, gelar penguasa Tanete] untuk berkuasa di Agangnionjo. Dia memerintah selama setahun ketika padi mulai mati dan jumlah ikan mulai berkurang. Setelah tiga tahun, padi gagal total dan ikan menghilang, dan rakyat sangat menderita akibat kelaparan. [Puang Lolo] menyatakan pada tetua, “Saya minta maaf atas yang telah saya lakukan. [Pergilah dan] jemputlah seorang *arung* untuk menggantikan saya sebagai penguasa, karena saya bukan keturunan asli seorang *arung*.” (Niemann 1883:14.)

Puang Lolo diturunkan dan seorang *arung* dari Segeri dilantik sebagai penguasa; pemulihan kesuburan yang mengikuti amat jelas di kepala penulis Kronik hingga dia tidak perlu mengguratkannya. Meski riwayat ini bertugas untuk menjelaskan hubungan historis Tanete dan Segeri (Noorduyn 1965: 139), pengaitan kesuburan dengan status juga nampak dan tak meragukan. Klaim bahwa penguasa adalah ‘saluran’ yang dibutuhkan demi kesuburan alami adalah pembenaran utama posisinya sebagai penguasa.²⁹

O.W. Wolters mengangkat hipotesis bahwa pada masyarakat Asia Tenggara masa pra-Indianisasi ‘kepemimpinan [...] berkaitan dengan apa yang kadang disebut para ahli antropologi di belah dunia lain sebagai fenomena “orang besar” ’ (Wolters 1982: 5). Istilah ini merujuk pada kepemimpinan berbasis pencapaian, dan bukan kepemimpinan berdasarkan warisan atau keturunan.

‘Orang besar tidak menerima begitu saja jabatannya; mereka tidak mewarisi, dan tidak dilantik, posisi kepemimpinan yang telah ada bagi kelompok politis. Pencapaian status orang besar lebih merupakan hasil dari serangkaian tindak yang mengangkat seseorang di atas kerumunan orang banyak dan menarik di sekitarnya kawan-kawan yang setia.’ (Sahlins 1963: 289.)

Bukti dari sumber-sumber Sulawesi Selatan tidak mendukung model kepemimpinan politik ‘orang besar’ ala Wolters. Sumber-sumber sejarah Bugis dan Makassar berkeras bahwa status mendahului kekuasaan politik. Pencapaian seorang penguasa sebelum penunjukannya tidak pernah disebutkan, dan penunjukan seorang penguasa hanya didukung oleh statusnya. Meski Kronik-Kronik melukiskan gambaran yang samasekali keliru tentang pemilihan penguasa, tetap sulit membayangkan seorang berstatus rendah dapat menarik cukup banyak pengikut untuk memperoleh jabatan tinggi. Perlu dicatat juga bahwa hipotesis Wolters sebagian bersandar pada ‘keterbukaan’ yang jelas terlihat pada sistem keturunan bilateral, yang tidak berpihak pada garis laki-laki maupun

²⁹ Kepercayaan tentang penguasa Bugis sebagai sumber kesuburan juga terlihat di Toraja. Nooy-Palm menulis: ‘Setiap tahun sebagian tokoh Pantilang [sebuah kerajaan di Toraja] pergi ke Luwu’ untuk memberi penghormatan kepada Datu. Seekor ayam jantan selalu menjadi bagian dari sembahsan mereka. Sebaliknya, mereka menerima dari datu benih padi yang dia berkati secara langsung.’ (Nooy-Palm 1979: 69).

perempuan dalam membentuk garis keturunan. Dia mencatat: ‘Ciri menonjol dari kekerabatan bilateral adalah merendahkan pentingnya garis keturunan yang berlandaskan klaim terhadap status melalui salah satu garis, laki-laki atau perempuan’ (Wolters 1982: 5). Pendapat ini tidak berlaku bagi masyarakat dataran rendah Sulawesi Selatan pra-Islam, di mana status askriptif menjadi pusat perhatian para penulis Kronik dan silsilah. Selanjutnya, garis keturunan dapat dikonstruksi di masyarakat penganut kekerabatan bilateral seefektif pada masyarakat unilineal (lihat artikel Bulbeck pada jilid ini). Di kerajaan-kerajaan Bugis konstruksi ini diperoleh dari kaum wanita yang berperan sebagai penanda dan jembatan untuk memperoleh status. Sementara silsilah dan Kronik menunjukkan bias patrilineal yang kuat pada penunjukan seorang penguasa, khususnya di tingkat tinggi, kepantasan untuk menjabat sebuah posisi politik (yaitu status askriptif yang tinggi) dapat diperoleh lewat kaum wanita. Ini berlangsung karena wanita tidak pantas (paling tidak menurut teori—namun hanya itulah yang dibutuhkan) menikahi lelaki berstatus lebih rendah.³⁰ Lewat persebaran penulisan, penyalinan, dan penyimpanan silsilah yang dihubungkan dengan jabatan politik di masyarakat Bugis, transmisi status askriptif melalui kaum wanita merupakan bagian fundamental dalam pengendalian jabatan politik.

Millar menyatakan bahwa relasi gender di masyarakat Bugis moderen hampir menyeluruh merupakan subordinat bagi sebuah ikatan kultural di mana berlaku tempat sosial (Bugis, *onro*) yang hierarkis (Millar 1983). Kelebihan status wanita menurut jenis kelaminnya agaknya menjadi alasan di balik penunjukan wanita sebagai penguasa di sebuah domain dan, terkadang, kerajaan. (Lebih banyaknya penunjukan pria menjadi penguasa kerajaan boleh jadi mencerminkan pentingnya keterampilan ‘pria’, seperti kecakapan militer, dalam masyarakat Bugis pra-Islam.) Penguasa wanita yang terkadang muncul dalam sumber Bugis disebutkan sebagai wanita berkarakter kuat: contoh menonjol pada masa pra-Islam adalah We Tekewanua dari Soppeng, yang ‘membelah yang lebar dan memotong yang panjang’³¹ dan menikahi atau menunjuk beberapa putra dan putri dari domain-domain penting di dalam kerajaan. Dia juga dikenang sebagai pengarah perluasan pertanian di Soppeng utara pada awal abad ke-15.³²

Nilai penting status askriptif sebagai syarat untuk memperoleh jabatan politik membatasi akses menuju kekuasaan hanya bagi kaum elit berstatus tinggi dan berjumlah kecil. Seringnya terjadi pernikahan antara keluarga penguasa dengan keluarga *arung* pada Kronik dan silsilah memperlihatkan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan

³⁰ Pelras (1971:211) menyatakan bahwa keturunan dari pernikahan antara seorang pria bangsawan tinggi dari tingkat *ana sipue* atau di atasnya dan seorang wanita berstatus sedikit lebih rendah akan mewarisi status ayah mereka. Kebalikan dari praktik lazim pada kalangan tingkat tinggi aristokrat Bugis bisa jadi merefleksikan kurangnya wanita berstatus amat tinggi yang tersedia untuk dinikahi (bandingkan dengan Errington 1989: 22). Anak-anak dari pernikahan antara pria berstatus tinggi dan seorang wanita biasa akan mewarisi status yang sedikit lebih tinggi dari ibu mereka.

³¹ Yaitu: dia tidak mengizinkan adanya oposisi atas pemerintahannya.

³² MS. NBG 99: 224-30.

serangkaian klan berbentuk kerucut (Kirchoff 1959) tetapi dengan anggota sebuah kelas berstatus tinggi yang sukses.³³ Perbedaan status di kalangan elit ini kadang tersurat di dalam silsilah (dalam silsilah Dewaraja, penguasa Luwuq di awal abad ke-16, mencatat bahwa dia menikahi putri penguasa sebelumnya, dari isteri yang berstatus lebih rendah³⁴) dan dalam berbagai Kronik Bugis (ambil contoh, pada Kronik Bone tentang silsilah To Sualleng dan To Salawakeng yang dikutip di atas).

Singkatnya, hak menjadi penguasa, menurut sumber-sumber Bugis dan Makassar, adalah status prerogatif (yang sudah melekat), bukan pencapaian dan tidak berhubungan dengan daerah tertentu. Gagasan tentang status amat berkembang dalam catatan sejarah Bugis, sebagaimana dapat dilihat pada legenda tomanurung, di mana sebagian besar Kronik Bugis dimulai dan yang menjadi sumber utama status bagi keluarga penguasa yang dirujuk oleh karya-karya ini (Kern 1929: 297; Macknight 1983: 98), dan untuk keperluan status askriptif yang betul yang diuji lewat persebaran pencatatan silsilah, yang sebagian berasal dari masa perkembangan tulisan di sekitar tarikh 1400.

Ekonomi kekuasaan: Perdagangan dan pertanian

Kini kita punya gambaran tentang beberapa kerajaan besar, yang masing-masing terdiri dari selusin atau lebih domain semi independen, yang salah satunya menjadi nama kerajaan dan pusat politik kerajaan tersebut. Kerajaan dan domain diperintah oleh kaum elit yang secara fisik dapat berpindah-pindah dan berhubungan erat, yang hak kepenguasaannya berasal dari status askriptif. Sekarang marilah kita mengalihkan perhatian pada basis ekonomi dari kekuasaan politik, yakni kendali atas perdagangan dan pertanian.

Sulawesi Selatan mungkin merupakan sumber terkaya di Indonesia akan temuan keramik yang diperdagangkan dari Cina dan Asia Tenggara. Kebanyakan dari temuan ini berasal dari abad ke-13 dan 16, sementara sebagian kecil, mungkin sepuluh persen, berasal dari abad-abad lebih awal (Hadimuljono dan Macknight 1983: 77). Menurut para pedagang barang antik di Ujung Pandang dan Palopo, kebanyakan temuan-temuan yang lebih tua berasal dari Luwuq dan Selayar. Keramik yang berasal dari abad ke-14 dan 15 juga dapat ditemukan di daerah-daerah pedalaman seperti lembah Walennae, dan banyak dari barang-barang abad ke-13 hingga abad ke-16, telah ditemukan dari kuburan pra-Islam di pantai barat semenanjung ini (Bulbeck 1992: Ch. 5-13). Sebagaimana di daerah lain di Indonesia dan Filipina, kedatangan perdagangan keramik di Sulawesi Selatan tidak menandai awal perdagangan internasional tetapi merupakan asal-usul dan perkembangan ekspor keramik Cina dan Asia Tenggara yang terinspirasi oleh Cina.

³³ Pada abad ke-17, lebih awal di Ajattappareng, pernikahan antara kerajaan sering terjadi, dan sejak itu sulit mengetahui apakah kita sedang berbicara tentang keluarga multi penguasa atau sebuah kelompok bilateral tunggal dari individu-individu berstatus tinggi

³⁴ MS. MAK 100: 136.

Perdagangan adalah bagian penting ekonomi politik Sulawesi Selatan pada masa pra-Islam. Ekonomi politik kerajaan Luwuq, yang luas dipercaya sebagai kerajaan besar pertama di Sulawesi, kemungkinan besar menyandarkan diri hampir-hampir mutlak pada perdagangan. Tanah di daerah Luwuq miskin dan hingga kini hasil tanaman utamanya adalah sagu (Takaya 1984: 85); satu-satunya sawah yang cukup luas terletak di selatan Palopo, di sepanjang dataran pantai yang sempit. Bukti-bukti tekstual dan arkeologis menunjukkan bahwa pada abad ke-16, pusat istana Luwuq bukanlah di Palopo melainkan di Pattimang Lama, dekat Malangke, di sekitar pertengahan jalan sepanjang pantai antara Palopo dan Malili. Dari sini, penguasa-penguasa Luwuq mengendalikan rute perdagangan ke luar dari dataran tinggi di bagian tengah dan barat pusat kerajaan,³⁵ serta ekspor besi dari Danau Matano. **Salah satu ekspor utama Luwuq adalah damar, getah yang menetes dari spesies pohon tertentu (Caldwell 1993a, 1993b).**

Kronik Wajo (Noorduyn 1955; Zainal Abidin 1985) memberitahu kita bahwa di awal abad ke-16, Luwuq menjadi penguasa atasan di hilir Sungai Cenrana. Daerah ini kemungkinan besar merupakan tempat ideal untuk mengendalikan perdagangan yang berlangsung di sepanjang sungai antara pantai dan domain-domain pedalaman di lembah Walennae dan Cenrana. Perdagangan di sepanjang sungai ini agaknya lebih tua lagi: legenda tentang kerajaan Cina, yang berkaitan erat dengan Luwuq di dalam kisah I La Galigo, terletak di suatu tempat di sepanjang sungai ini (Caldwell 1988: 207-11). Baringeng, Pammana, Tetewatu, dan domain-domain³⁶ lain yang terletak di bagian hulu lembah Sungai Cenrana menjadikan kerajaan yang telah hilang ini sebagai sumber status untuk keluarga penguasa mereka.³⁷ Identifikasi terhadap Cina bahkan meluas hingga pengangkatan seorang 'Datu Cina' sebagai penguasa atasan daerah ini (Zainal Abidin 1983: 220).

Sumber-sumber Bugis pada kurun pra-Islam kebanyakan berceritera tentang status dan kekuasaan, dan tidak menyebutkan perdagangan secara langsung. Akan tetapi, daftar daerah bawahan Luwuq merupakan bukti menonjol akan pentingnya Luwuq sebagai kerajaan dagang di masa pra-Islam (Caldwell 1988: 78). Dalam daftar ini dibentangkan sekitar 70 nama tempat, dipilah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, sekitar 30, menyebut pemukiman-pemukiman yang kini merupakan daerah Kabupaten Luwu³⁸, dan kelompok kedua yang terdiri dari 40 nama merujuk pada pemukiman-pemukiman di pantai selatan dan baratdaya semenanjung ini. Banyak dari tempat ini terletak antara Takalar dan Bantaeng. Dua wilayah ini, Luwu dan pantai selatan, juga terhubung di dalam daftar yang memutarbalikkan fakta tentang 'Pembayar

³⁵ Arti penting perdagangan Luwuq dan dataran tinggi Toraja tercermin dalam syair ritual Toraja (Zerner 1981: 97-8). Ekspor abad ke-19 dari wilayah Toraja meliputi emas, kopi dan Budak (van Braam Morris 1889: 506, 508, 516-7).

³⁶ MS. NBG 99: 236-41.

³⁷ Dalam Lontaraq Sukkuqna Wajoq, Cina berperan sebagai sumber status dalam sebuah legenda mengenai asal-usul Cinnottaqbi (Zainal Abidin 1985: 65).

³⁸ Artikel ini ditulis sebelum Kabupaten Luwu dibagi tiga.

upeti' Majapahit, Nagarakartagama, yang mencatat '[...] negara-negara Bantayan, utamanya Bantayan, di samping itu Luwuk, kemudian (negara-negara) Uda, menjadi tiga serangkai; ini adalah tiga negara terpenting bagi yang sepulau dengannya' (Pigeaud 1962: 17).

Pigeaud mengidentifikasi Bantayan sebagai Bantaeng³⁹ dan Luwuk sebagai Luwuq, atau mungkin Luwuk, sebuah pemukiman di pantai tenggara Sulawesi Tengah. Uda diidentifikasi sebagai kepulauan Talaud (Pigeaud 1962: 17). Dua identifikasi terakhir masih dipertanyakan: Luwuk dan kepulauan Talaud tidak berada pada jalur perdagangan abad ke-16 ke Filipina atau ke pulau rempah-rempah (Meilink-Roelofs 1962: 84, 86-7), selain itu keduanya tidak dikenal punya peran penting secara ekonomis dan politis. Pada abad ke-16, seluruh pantai selatan Sulawesi Selatan menjadi bawahan Goa, karena itu persekutuan politik yang terekam pada daftar daerah bawahan Luwuq pasti berasal dari abad ke-15 atau sebelumnya.

Hampir dapat dipastikan bahwa hubungan antara Luwuq dan domain-domainnya di pantai selatan berpusat pada perdagangan antara Jawa dan Sulawesi Selatan. Rute perdagangan dari Jawa ke Maluku paling tidak telah dikenal sejak abad ke-14 dan bisa jadi dari awal millennium pertama. Jalur paling langsung melalui pantai utara Nusa Tenggara, tetapi jalur alternatif dimulai dari Sumbawa ke pantai selatan Sulawesi Selatan, lalu ke timur lewat Selayar dan Buton hingga ke Maluku. Daftar daerah bawahan Luwuq menyiratkan dengan amat kuat bahwa Luwuq berdagang dengan Jawa dan mungkin belahan lain Nusantara lewat pantai selatan.

Apakah yang disediakan Luwuq? Eksport Luwuq agaknya adalah produk hutan, seperti damar, rotan, kayu yang jarang ditemukan dan madu. Tetapi Luwuq juga adalah pengeksport besi. Catatan paling awal tentang ekspor besi dan baja dari Luwuq ditulis oleh Speelman (1670: 43), namun awal perdagangan ini mungkin jauh lebih tua. Besi, yang kemungkinan besar mengandung sedikit nikel, dikirim ke Jawa, di mana hingga kini ciri tertentu tatahan **besi-nikel pada bilah keris Jawa disebut pamor Luwuq (Solyom dan Solyom 1978: 18; Bronson 1987: 13).**

Apakah perdagangan Luwuq dibawa oleh kapal Bugis? Sumber-sumber luar memberi petunjuk yang amat menarik tentang keterlibatan Makassar dan Bajau pada perdagangan maritim abad ke-15 dan 16. Sejarah Melayu mencatat sebuah serangan terhadap Malaka oleh Semerluki, 'Raja Mengkasar', selama pemerintahan Sultan Mansur Syah (kira-kira 1456-1477) (Brown 1952: 99-100), dan terdapat rujukan membingungkan pada tulisan Tome Pires *Suma Oriental* yang menggambarkan orang Bajau dari Sulawesi (Reid 1983: 127). Pires juga menulis tentang perdagangan dengan 'Macacar' yang ditafsir oleh Macknight (1983: 100) sebagai tanda adanya perdagangan ekstensif orang non-Bajau antara pantai barat semenanjung ini dengan Malaka. Keberadaan pedagang asing di Sulawesi ditandai dengan sejumlah nama tempat yang berasal dari Jawa, seperti

³⁹ Ketiadaan Bantaeng dalam daftar daerah bawahan Luwuq agaknya mendukung klaim implisit Nagarakartagama bahwa Bantaeng adalah kekuatan otonom.

Garassiq, Tuban, dan Jipang, di pantai selatan dan barat daya semenanjung. Tradisi lisan yang menyebutkan kontak dengan orang Jawa dan pemukiman di masa dahulu ditemukan di Pulau Selayar, yang hingga kini masih menjadi tempat pemberhentian jalur pelayaran dari Jawa ke Indonesia Timur (Pelras 1996).

Menariknya, terdapat sedikit bukti pada sumber-sumber Sulawesi Selatan tentang jenis peran yang dimainkan oleh orang Bugis dan Makassar dalam perdagangan Nusantara di abad-abad selanjutnya. Seorang penguasa Talloq awal abad ke-16 disebutkan telah mengunjungi Malaka dan menagih utang di Johor (Abdul Rahim dan Ridwan Borahima 1975: 9), namun perdagangan Nusantara agaknya sebagian besar dipegang orang Malayu dan mungkin orang Jawa dan Bajau (Reid 1983: 135). Beberapa bukti meragukan tentang perdagangan orang Bugis ke timur yakni ke Nusa Tenggara dan Maluku ditemukan pada silsilah yang berasosiasi dengan Dewaraja, penguasa Luwuq awal abad ke-16. Silsilah mencatat bahwa ‘ayah Dewaraja adalah Sangaji Batara, yang pergi ke Timoroq untuk menikah. Dia mempunyai putra bernama Dewaraja. [...] Dewaraja kembali ke Luwuq dan menikahi putri Datu Luwuq, bernama La Malalaeq.’⁴⁰

Timoroq adalah sebutan orang Bugis untuk Pulau Timor, dan silsilah ini dapat ditafsirkan sebagai penyebutan keberadaan cabang keluarga penguasa Luwuq yang tinggal di Timor pada abad ke-16. Jika memang betul, catatan ini bisa menjadi bukti paling awal keterlibatan elit Bugis dalam perdagangan Nusantara.⁴¹ Sayangnya, dalam bahasa Bugis adalah jamak jika bunyi *o* bisa juga menjadi *u*, terkhusus pada dialek Wajoq dan Soppeng (Le Roux and Cense 1935: 706), dan perubahan itu juga ditemukan pada teks lain, di mana rujukan ini muncul. Tiga huruf Bugis *Ti Mo Ro* yang dibaca Timoroq, juga bisa dibaca Timurung, sebuah daerah di utara Bone.

Hingga kini, belum ada kajian tentang peninggalan keramik dari Luwuq. Namun bukti dari kerajaan Soppeng di pedalaman, yang hingga awal abad ke-20 berdagang lewat pemukiman-pemukiman bawahannya di Batu-Batu di tepi selatan Danau Tempe (percakapan langsung, Dr. Christian Pelras), menunjukkan bahwa skala perdagangan antara Sulawesi Selatan dengan belahan lain Nusantara pada abad ke-13 sampai 16 cukup mengesankan. Sebuah survei terhadap bekas ibukota Kerajaan Soppeng di Tinco, 80 km dari pelabuhan terdekat, menemukan lebih dari 2000 puing keramik impor dari Cina dan Asia Tenggara, berasal dari abad ke-12 (Bahru Kaluppa dkk. 1989: 48). Kekayaan yang tidak biasa pada temuan di Tinco ini, dibandingkan dengan pemukiman-pemukiman di sekitarnya, memperlihatkan kendali raja terhadap keramik mahal dan dapat menguatkan status. Diduga, keramik ini berguna untuk mengekalkan kesetiaan pada hierarki di dalam

⁴⁰ MS. MAK 100:136.

⁴¹ Letak Timor menghadang hembusan angin dari Teluk Bone selama angin muson tenggara, yang bertiup dari April hingga November. Para pembuat perahu Sulawesi Selatan yang berasal dari tradisi pembuatan perahu dibagian timur Indonesia di mana lunas dibuat dengan menggali membentuk sisi perahu dengan tambahan papan untuk membentuk perahu pipih di mana cadik ditambahkan untuk memproduksi perahu yang berlunas dalam dan licin yang dapat berlayar secara efisien mengikuti arah angin (percakapan langsung, N. Burningham, Museum Maritim Perth).

kerajaan dan merangsang pengiriman bahan makanan dan barang ekspor dari domain-domain.

Hal ini membangkitkan pertanyaan: apa yang dipertukarkan Soppeng dengan keramik dan, kemungkinan, tekstil berbahan sutera dan katun. Lembah Walennae tidak punya banyak kandungan mineral, dan barang harus diangkut kebanyakan lewat darat. Bahan dagangan yang paling nampak, jika Soppeng mendominasi lembah Walennae yang subur, adalah beras. Seorang pengelana asal Belanda Stavorinus menulis pada tahun 1775: '[Soppeng] tidak menghasilkan apa-apa kecuali padi' (Stavorinus 1798: 228).

Macknight menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1400 berlangsung peralihan penting basis kekuasaan politik, dari perdagangan ke pertanian. Bukti-bukti yang dia ajukan berasal dari banyak pernyataan pada Kronik Bugis dan Makassar untuk secara terpusat mengendalikan pertanian dan perluasannya pada abad ke-15 dan 16 (Macknight 1983). Tidak seperti perdagangan, yang tidak bergantung pada kebiasaan dari luar, dan karena itu harus tunduk pada arus aneh persediaan dan permintaan, potensi ekonomis pertanian tetap hanya dibatasi oleh ketersediaan tanah yang baik untuk ditanami dan tenaga untuk mengerjakannya. Keberhasilan pertanian tidak hanya berguna untuk menarik pengikut baru dan mempertahankan kesetiaan, tetapi juga untuk memberi makan bagi mereka yang membuka lahan baru. Ekspansi pertanian yang terorganisir terbantu oleh kenyataan bahwa pada abad ke-15 tanah dapat dibeli dan dijual, paling tidak oleh kaum elit. Kronik Bone menceritakan, misalnya, bagaimana seorang penguasa pada akhir abad ke-15 membeli dua bukit di barat Bone.

'Yang Mulia Makkalemiqe membeli bukit di selatan Laliqdong, dan dia membelinya dengan 30 sapi. Setelah itu, dia memerintahkan orang untuk tinggal di bukit Cina. Dia juga menitahkan mereka untuk membuka kebun. Dia pula memerintahkan orang untuk pergi ke bukit di selatan Laliqdong yang telah dia beli.' (Macknight dan Mukhlis, belum terbit).

Dalam silsilah keturunan seorang penguasa Luwuq awal abad ke-16 kita dapat membaca bahwa 'Settie [seorang anggota keluarga istana Luwuq] diusir oleh [rakyat Luwuq]; dia diusir, menurut riwayat, atas kesepakatan dengan saudaranya, To Luwuqmangura. Karena itulah, Settie membeli tanah di Mamutu dan tinggal di sana.'⁴²

Di bagian awal Kronik Bone terdapat catatan tentang pemukiman ulang rakyat di bawah penguasa ke-3, Kerrampeluaq, di mana tertulis: 'Sebagian rakyat Bukaka dipisahkan kemudian dibawa untuk tinggal di Majang dan mereka juga dijadikan rakyat [We] Makkalempie [putri Kerrampelua dan *arung* Majang]'. Kelak di Kronik yang sama kita temukan bahwa: 'Juga ketika raja itu memerintah dia mengirim budak pribadinya dan menempatkan mereka di Panyula dan mereka kemudian disebut orang Panyula. Lalu,

⁴² MS. MAK 100:136

budak yang menjadi miliknya ketika dia memerintah, dia tempatkan di Lipenno.’ (Macknight dan Mukhlis, belum terbit).

Dalam silsilah kerajaan Soppeng dan hulu lembah Cenrana, beberapa individu juga dikenang sebagai pendiri pemukiman. Ini tidak hanya melibatkan pengarah dalam bekerja, tetapi juga pemberian makan kepada mereka yang membuka lahan. Agaknya, pada tahap awal, ekspansi pertanian tidak hanya digagas oleh penguasa kerajaan, tetapi juga oleh saudara penguasa, yang pergi bersama para pegikutnya untuk membuka lahan baru dan mendirikan pemukiman baru. Motif pan-Austronesia di mana saudara yang tidak puas pergi untuk mendirikan pemukiman baru juga ditemukan pada Kronik Sidenreng. Kisah ini dimulai ketika delapan adik laki-laki penguasa Sangallaq (sebuah kerajaan di Toraja) tidak puas terhadap saudaranya yang lalim. Mereka lalu memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya demi mencari negeri yang cocok di mana mereka bisa membuka pemukiman baru.

‘Ketika mereka mendekati perbukitan di selatan dataran tinggi Toraja mereka melihat sebuah danau [...] Bersamaan mereka berkata, “Di sini, sebelah barat danau ini, tempat yang baik untuk kita tinggali”. Maka, mereka beserta pengikut, berjalan untuk mencari tempat tinggal, di mana mereka dapat membuka lahan. Selama tiga tahun mereka mengolah [tanah], dan panen padi mereka dan crop lain mereka dan jumlah pengikut mereka bertambah.’⁴³

Dalam sebuah Kronik Wajo kita diceritakan bagaimana pihak-pihak yang tidak puas dipimpin oleh tiga saudara penguasa hengkang ke Cinnottaqbi, sebuah domain awal, dan ‘hidup dari kebun mereka’. Kelak, keturunan pewaris sah pun hengkang dan membangun pemukiman baru (Noorduyn 1955: 156). Berfokus di seputar individu berstatus tinggi (saudara laki-laki dan perempuan yang berstatus askriptif setaraf), pemukiman baru ini, sebenarnya, merupakan domain baru, berkait dalam beragam tingkat kesetiaan dengan pusat politis kerajaan.

Bukti meningkatnya peran pertanian yang diarahkan secara terpusat, khususnya pertanian padi basah, sejak sekitar tahun 1400 dapat ditemukan dengan cukup mudah pada sumber Bugis dan Makassar. Bukti arkeologis mendukung asumsi Macknight bahwa surutnya perdagangan sebagai basis kekuasaan (Macknight 1983) bersifat relatif, tidak absolut. Paling tidak di Soppeng, kuantitas keramik impor terus meningkat antara tahun 1400 hingga 1600 (Bahru Kaluppa dkk. 1989, gambar 17-20). Kemungkinan, peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kemakmuran pertanian di pusat Soppeng dan meningkatnya ketersediaan dan semakin mudahnya keramik impor.

Yang pasti, paling tidak sejak abad ke-14 kerajaan pertanian di Sulawesi Selatan berhubungan, kemungkinan lewat pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa, dengan

⁴³ MS. Salim 1:16. Sebuah naskah yang disimpan dengan deskripsi ini pada Perpustakaan Australian National University, Canberra.

berbagai tempat hingga Thailand, Vietman, dan Cina, dan bisa jadi secara langsung dengan Filipina Selatan (Macknight 1983: 95-6). Bangkitnya kerajaan 'selatan' Ajattappareng, Wajoq, Bone, Soppeng, dan Makassar berkaitan erat dengan ekspansi dan intensifikasi pertanian yang diarahkan secara terpusat, walaupun peninggalan berjumlah besar barang-barang berwarna hijau polos (seladon) dan keramik putih dan biru berkualitas tinggi di situs-situs Soppeng memperlihatkan bahwa perdagangan senantiasa menjadi bagian penting dari basis ekonomi dalam kehidupan politik.

Topografi kekuasaan

Di bagian awal kita telah menelusuri bagaimana status kelahiran terekam dalam sumber-sumber historis Sulawesi Selatan bukan hanya berperan sebagai syarat memperoleh kekuasaan politis, tetapi juga diyakini mencatat pelaksanaan kekuasaan itu sendiri secara efektif. Kekuasaan politik itu dijalankan pada sebuah lanskap berupa dataran-dataran sawah yang subur, dipisahkan oleh perbukitan rendah dihiasi ladang yang bertebaran atau oleh pegunungan liar dan berhutan. Ketika kita melihat lanskap kemudian dihubungkan dengan geografi politik kerajaan-kerajaan ini, jelas nampak bahwa ciri topografi memainkan peran penting dalam distribusi kekuasaan di Sulawesi Selatan.

Determinan topografi utama serupa dengan kebutuhan fisik produksi pertanian, yakni irigasi, pengerahan tenaga kerja, dan pertahanan. Geertz menunjukkan bagaimana di Bali, ibukota-ibukota kerajaan di selatan Bali, kecuali Badung, masing-masing terbentang pada garis sepanjang hampir 350 meter, 'tepat di atas tempat di mana sesuatu yang dapat disebut dataran bermula' (Geertz 1980: 22). Ini adalah garis pemisah antara penguasa dataran tinggi yang mengendalikan irigasi, dengan penguasa dataran rendah yang menguasai produksi padi. Tuntutan fisik pertanian—irigasi, komunikasi, dan pertahanan—agakny menentukan lokasi pusat-pusat istana di Bali.

Penataan ruang kekuasaan di Sulawesi Selatan pra-Islam juga dikaitkan dengan pertanian, khususnya pertanian padi basah. Pusat-pusat istana Luwuq, Soppeng, Bone, Wajoq, Sidenreng, Rappang, Sawitto, Alitta, dan Suppaq semuanya terletak begitu ideal hingga dapat mengendalikan potensi ekonomi daerah masing-masing. Ibukota ganda Soppeng sebelum abad ke-16 berdiri di perbukitan rendah di mulut dua lembah kecil yang terbujur dari perbukitan barat hingga lembah Walennae. Ibukota Soppeng Barat berada di Tinco, di bibir lembah utara. Tempat ini ideal untuk mengarahkan produksi pertanian di dataran sebelah timurnya, serta pergerakan manusia dan barang dari dataran itu ke daerah-daerah pantai di barat. Ibukota Soppeng Timur (kini ibukota Kabupaten, Watansoppeng) berada pada sebuah bukit rendah di kaki lembah selatan, di mana letak ini juga menikmati keistimewaan serupa (lihat Gambar 2). Watampone, ibukota Kerajaan Bone, terletak 6 km dari laut di dataran pantai berlatar perbukitan rendah atau bukit batu kapur. Dataran itu, yang tidak punya pelabuhan dan jalur mudah ke luar masuk daerah pedalaman, tidak mempunyai bukit besar, danau, maupun sungai besar. Watampone, yang terletak di tengah-tengah dataran tanpa keistimewaan ini, sangat ideal untuk

mengendalikan potensi pertanian dataran ini lewat kendali komunikasi, sebuah aspek penting bagi produksi padi basah yang diarahkan secara terpusat.

Kegagalan Wajoq mengembangkan kekuasaan terpusat sebagaimana Bone kemungkinan berkaitan dengan kurangnya dataran yang cukup luas, yang terletak di utara Sungai Cerekang. Peta topografi Wajoq memperlihatkan bahwa sungainya tidak mengalir ke barat menuju laut, sebagaimana sungai di Bone, tetapi meliuk-liuk ke beberapa arah, mengisi danau-danau kecil dan menandakan wilayah ini mudah terkena banjir. Kronik Wajoq merekam tradisi tiga 'ibukota' awal yang masing-masing terpisah, yang menyiratkan bahwa tidak ada satu tempat pun yang memegang keistimewaan alamiah untuk mengontrol pertanian ataupun perdagangan (Zainal Abidin 1985). Faktor geografis kemungkinan menjadi alasan kerajaan-kerajaan Ajattappareng, juga, tidak berkembang menjadi kekuatan politik yang bersatu sekaliber Bone atau Goa, meski potensi pertanian daerah ini amat besar, yang kini dikenal sebagai 'lumbung padi' Sulawesi Selatan (Maeda 1984: 123). Masing-masing dari lima kerajaan (Sidenreng, Rappang, Sawitto, Suppaq, dan Alitta) meliputi sebuah dataran, terpisah dari yang lainnya oleh perbukitan rendah atau oleh air. Diiri oleh musim hujan, setiap dataran mempunyai sistem irigasi sendiri-sendiri, yang pengaturannya membutuhkan pengarahan lokal berdasar pengetahuan rinci atas wilayah itu. Tidak ada satupun dari lima kerajaan ini yang secara pribadi dapat menyaingi kekuatan ekonomi dan militer Goa atau Bone, sementara jarak dan bentuk topografi menyulitkan mereka untuk terintegrasi secara efektif ke kedua kerajaan tersebut.

Geografi politik kerajaan-kerajaan pertanian di Sulawesi Selatan memperlihatkan kontras yang menarik dengan wilayah pantai dan sungai di kerajaan-kerajaan Melayu, di mana keseimbangan antara tuntutan perdagangan dan pertahanan difasilitasi oleh berlusin-lusin muara sungai dan sekian ratus kilometer garis pantai di mana mereka meletakkan ibukota kerajaan. Mobilitas yang menonjol pada kekuasaan politik dunia Malayu tercermin pada Sejarah Malayu dalam kutipan percakapan antara Sri Nara 'diraja dan Sultan Mahmud dari Malaka selama penyerangan Portugis terhadap Bintan tahun 1526. Dalam pembicaraan ini, Sri Nara 'diraja menekankan bahwa kerajaan teritorial atau fisik merupakan hal ke dua dari penguasanya sendiri:

'Sri Nara 'diraja menitahkan dia untuk meninggalkan Bentan karena kini kota itu akan jatuh. Tetapi dia menjawab, "Ketika saya datang ke sini, Sri Nara 'diraja, saya tahu betul bahwa Bentan adalah pulau; dan karena saya paham bahwa tidak ada jalan mundur maka saya berdiam di sini! Jika saya pernah berpikir melarikan diri, saya lebih baik tinggal di pulau induk. (Tetapi saya tidak melakukannya,) karena sudah menjadi kebiasaan raja bahwa ketika negeri mereka jatuh di tangan musuh, mereka harus jatuh mati pula." Dan Sri Nara 'diraja menjawab, "Yang Mulia salah. Setiap negeri punya seorang Raja, dan jika Yang Mulia diberi hari panjang, kami bisa mencari sepuluh kerjaan buat Tuanku!" (Brown 1952:189).

Perjalanan awal Sultan ini setelah kejatuhan Malaka, pertama ke Batu Hampar, lalu ke Pahang, dan akhirnya Bintan, di mana kerajaannya dibangun ulang di sekitarnya, yang mencerminkan kebenaran pendapat Sri Nara 'diraja. Jika garis keturunan penguasa tetap ada, kerajaan pun begitu. Pembunuhan terhadap Sultan Mahmud dari Johor, yang meninggal tanpa menurunkan pewaris, mengakhiri garis keturunan penguasa yang dapat mengklaim diri sebagai turunan dari penguasa Sriwijaya, dan struktur kompleks kesetiaan yang menjadi batu alas kesultanan Malayu tidak pernah sembuh dari kejadian mengejutkan ini. Kepunahan nenek moyang dan garis keturunan Mahmud menyebarkan krisis kesetiaan dan kepemimpinan yang memungkinkan seorang pengelana Sumatera, Raja Kecil, dengan mengaku sebagai putra penguasa yang terbunuh itu, merebut kendali kesultanan di tahun 1718 (Andaya 1975: 191, 264).

Kontinuitas geografis kerajaan Bugis dan Makassar, sebagian muncul di awal sumber-sumber tertulis dan berlanjut hingga abad ini, meski mengalami perang sipil selama beberapa dekade akibat meninggal atau tertangkapnya beberapa penguasa, memberi kesan bahwa penguasa Bugis atau Makassar bukanlah pusat penentu identitas kerajaan sebagaimana di kerajaan-kerajaan Malayu. Pembunuhan terhadap seorang penguasa sudah jamak terjadi, dan pembunuhan penguasa (dan penggantinya oleh bangsawan berstatus tinggi lain) agaknya tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan. Di antara penguasa yang terbunuh di berbagai masa pada abad ke-16 dan 17 adalah La Ulio, penguasa ke-6 Bone, dan La Icca', penguasa ke-8, yang terbunuh, sebagaimana tertulis dalam Kronik, karena kejam dan mangkir dari aturan (Macknight dan Mukhlis, belum terbit). Pada abad ke-16, Batara Wajo' ke-3, La Pateddungi, diusir lalu dibunuh, di antaranya karena mengambil putri dan isteri-isteri rakyatnya (Zainal Abidin 1985:99), sementara Tunipasuluq, penguasa ke-13 Goa, diusir pada tahun 1593, menurut Kronik Goa, karena sifat brutal dan sewenang-wenang dalam pemerintahannya (Wolhoff dan Abdurrahim 1959: 56; Reid 1983: 136). Selain itu, agaknya tidak terdapat bukti pada sumber-sumber Bugis dan Makassar bahwa penguasa dianggap sebagai 'batu bertuah' yang disekitarnya komunitas berkembang, sebagaimana kerajaan terindianisasi di Asia Tenggara (Zainal Abidin 1983: 253). Selanjutnya, kebutuhan untuk memperoleh penghidupan dari tanah akan menyulitkan mobilitas individual, sementara hal ini hampir-hampir tidak hadir di dunia maritim Malayu. Hasilnya, kemungkinan terdapat lebih sedikit kebutuhan untuk mentasbihkan penguasa sebagai fokus organisasi sosial mereka. Selain itu, gagasan orang Bugis tentang kekuasaan sebagai produk atau kualitas status berarti bahwa selalu ada sejumlah orang yang berpotensi menjadi penguasa: dalam teori, siapapun yang menyandang status askriptif pada derajat yang memungkinkan dapat menjadi penguasa. Sistem ini tidak berfokus pada satu garis keturunan, tetapi pada sebuah kelas yang berisi calon-calon penguasa yang bertebaran di sepanjang ladang dan bukit Sulawesi Selatan.

Sejumlah kesimpulan akhir

Kita telah menelusuri sebuah gambaran yang lumayan rinci tentang organisasi politik dan sosial beberapa kerajaan pra-Islam yang dapat ditemukan dari sumber-sumber sejarah Bugis. Sekitar tahun 1400, masyarakat berbahasa Bugis telah mempunyai kelompok kekerabatan yang bertingkat-tingkat, ekonomi yang redistributif, kepemimpinan yang diwariskan dan pernikahan di dalam kelompok kerabat elit. Dalam istilah para pengusung evolusi budaya, masyarakat ini berada pada level Perkauman (*chiefdom*) maju.⁴⁴ Sebagian kerajaan malah dapat disebut negara tahap awal; dalam Kronik terdapat rujukan tentang perpajakan dan wajib militer, dan beberapa bukti tentang hukum tertulis. Namun demikian, dari seluruh kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan yang benar-benar dapat kita sebut negara adalah Kerajaan Goa dan Talloq. Kronik dari dua kerajaan ini mencatat, pada abad ke-16, perkembangan kerajaan, pemberlakuan hukum tertulis, munculnya birokrasi, pemberlakuan wajib militer dan perpajakan, serta munculnya para ahli yang bekerja sehari-hari penuh pada profesi yang sama.

Para sejarawan Sulawesi Selatan sering tergoda untuk menyamakan permulaan catatan sejarah Bugis dengan awal munculnya kerajaan yang dirujuk catatan tersebut. Esai ini berupaya memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara semakin rumitnya masyarakat Bugis dengan catatan kita yang punyai tentang itu. Terlihat jelas dari bukti tertulis dan arkeologis bahwa pada abad ke-14, anggota beberapa keluarga berstatus tinggi telah diakui sebagai bangsawan tertinggi di wilayah geografis yang cukup luas dan dapat memerintah lebih dari satu kerajaan. Keluarga-keluarga ini saling mengakui sebagai keluarga berstatus setaraf dan, melalui semakin luasnya kawin-mawin, sementara dalam perjalanan untuk menjadi sebuah kelas tunggal yang bertalian erat dan tangkas secara politik. Sementara sebagian kerajaan, seperti Bone, kelihatannya muncul dari awal yang kecil di abad ke-14, asal-usul kerajaan lainnya tidak dapat ditemui dalam sumber tertulis.

Melihat ke depan, banyak kerja masih menanti pada daftar daerah-daerah bawahan dan silsilah, yang merupakan sumber terpenting informasi tekstual tentang

⁴⁴ Flannery mengajukan sebuah definisi berguna untuk perkauman (*chiefdom*) sebagai sebuah tingkatan sentralisasi politik yang ditandai dengan adanya stratifikasi sosial, umumnya dalam bentuk garis keturunan yang bertingkat-tingkat, di mana pria dan wanita sejak lahir telah dianggap keturunan 'ketua' atau 'orang biasa', tanpa melihat kemampuan individunya. Dalam masyarakat seperti itu, lahan pertanian atau tempat penangkapan ikan terbaik umumnya dipunyai oleh anggota atau garis keturunan berstatus paling tinggi. 'kepala' dalam masyarakat bertingkat tidak hanya terlahir sebagai bangsawan, tetapi juga biasanya dianggap keturunan dewa dan diyakini mempunyai hubungan khusus dengan dewa-dewa yang tidak bisa dilakukan oleh orang kebanyakan, dengan kekuatan ini mereka bertindak sebagai spesialis ritual yang penting. Selain itu, jabatan 'kepala' dapat dipegang oleh pria maupun wanita, yang jika meninggal jabatan ini harus diisi oleh orang yang berstatus sama tingginya. Sebagian perkauman mempertahankan silsilah rinci untuk menjamin suksesi yang pantas, sementara anggota perkauman berstatus tinggi memperkuat status mereka lewat barang-barang mewah. Perkauman biasanya berpenduduk banyak, di mana desa-desa para ketua teratas kadang berpenduduk ribuan jiwa. Perkauman memperlihatkan keterampilan yang amat terspesialisasi, namun biasanya tidak ada kelas untuk keterampilan tertentu; hampir seluruh pakar pada keterampilan tertentu juga bekerja sebagai petani (Flannery 1972: 402-3).

Sulawesi Selatan pra-Islam. Melalui kajian yang teliti terhadap silsilah kita boleh jadi dapat memetakan strategi perkawinan sepanjang beberapa generasi di kerajaan-kerajaan besar Bugis dan Makassar. Dari sana, kita bisa memahami lebih banyak tentang cara sebuah pusat politik kerajaan mempertahankan atau mengembangkan kendalanya atas domain-domain bawahannya. Bisa jadi, kita juga dapat mempelajari Sulawesi Selatan masa pra-Islam lewat kajian sastra epik Sulawesi Selatan dan legenda-legenda yang bertebaran yang berkaitan dengan Simpurusia, penguasa pertama Luwuq yang legendaris. Namun, ini semua membutuhkan metodologi lain dari yang dipakai untuk mempelajari catatan silsilah dan nama tempat, dan, dengan melihat kajian tentang epik Yunani, seperti Illiad dan Odissey (Finley 1964), prospeknya terlihat tidak menjanjikan. Tetapi hingga kini potensi terbesar untuk penelitian di masa datang berada pada kerjasama antara sejarahwan dan ahli arkeologi. Sejarahwan dapat membeberkan hipotesis tentang penataan ruang kerajaan Bugis yang dapat diuji oleh para ahli arkeologi melalui analisis puing keramik dan artefak lain yang ditemukan di kebanyakan situs pra-Islam. Gabungan beberapa pendekatan akan lebih efektif, karena data dari satu disiplin ilmu dapat mengatur dan memperkuat data dari disiplin lain. Pendekatan seperti ini menjanjikan penemuan sebuah gambaran rinci tentang kurun awal sejarah, yang dengan mantap menjembatani kita menuju gambaran pola budaya dan pemukiman prasejarah dan model perubahan sosial yang berlandaskan data.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahim, and Ridwan Borahima (eds), 1975, *Sejarah Kerajaan Tallo'*, Ujung Pandang: Pemerintah Daerah.
- Andaya, L.Y., 1975, *The Kingdom of Johor 1641-1728*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- , 1981, *The Heritage of Arung Palakka; A History of South Sulawesi (Celebes) in the seventeenth century*, The Hague: Nijhoff.
- Bahru Kallupa, David Bulbeck, Ian Caldwell, Iwan Sumantri, dan Karaeng Demmanari, 1989, *Survey pusat kerajaan Soppeng*, Canberra: Final report to the Meyer Foundation.
- Braam Morris, D.F. van, 1889, 'Het landschap Loewoe', *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 32:497-555.
- Bronson, B., 1987, 'Terrestrial and meteoritic nickel in the Indonesian keris', *Journal of the Historical Metallurgy Society* 21:8-15.
- Brown, C.C. (ed), 1952, 'The Sejarah Melayu or "Malay Annals"; A Translation of Raffles MS 18 (in the library of the Royal Asiatic Society, London) with commentary', *Journal of Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society* 25:7-276.
- Bulbeck, F.D, 1992, 'A tale of two kingdoms; The historical archaeology of Gowa and Tallok, South Sulawesi, Indonesia'. [disertasi, Australian National University, Canberra.]
- Caldwell, I.A., 1988, 'South Sulawesi A.D. 1300-1600; Ten Bugis texts'. [disertasi, Australian National University, Canberra.]
- , 1993a, 'Report on recent fieldwork', *Baruga* 9:6-8.
- , 1993b, 'Reply to D. Bulbeck', *Baruga* 9:18-9.
- Chabot, H.T., 1950, *Verwantschap, stand en sexe in Zuild-Celebes*, Groningen: Wolters.
- Coedes, G., 1968, *The Indianized states of Southeast Asia*, Canberra: Australian National University Press.
- Errington, S., 1989, *Meaning and power in a Southeast Asian realm*, Princeton: Princeton University Press.
- Finley, M.I., 1964, 'The Trojan war', *Journal of Hellenic Studies* 84:1-20.
- Flannery, K.V., 1972, 'The cultural evolution of civilizations', *Annual Review of Ecology and Semantics* 3:399-435.
- Geertz, C., 1980, *Negara; The theatre state in nineteenth-century Bali*, Princeton: Princeton University Press.
- Gonda, J., 1952, *Sanskrit in Indonesia*, New Delhi: International Academy of Indian Culture.
- Hadimuljono, and C.C. Macknight, 1983, 'Imported ceramics in South Sulawesi', *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 17:66-89.

- Hall, K.R., 1976, 'State and statecraft in early Srivijaya', in: K.R. Hall and J.K. Whitmore (eds), *Explorations in early Southeast Asian history; The origins of Southeast Asian statecraft*, Ann Arbor: Centre for South and Southeast Asian Studies.
- Kern, R.A., 1929, 'Boegineesche scheppingsverhalen', in: *Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid van zijn 150-jarig bestaan, 1778-1928*, Weltevreden: Kolff.
- Kirchoff, P., 1959, 'The principles of clanship in human society in human society', in: M.H. Fried (ed.), *Readings in anthropology*, New York: Crowell.
- Macknight, C.C., 1983, 'The rise of agriculture in South Sulawesi before 1600', *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 17:92-116.
- Macknight, C.C., and Mukhlis, forthcoming, *The chronicle of Bone*.
- Maeda, N., 1984, 'An inventory of agricultural rites in Amparita', in: N. Maeda and Mattulada (eds), *Transformation of the agricultural landscape in Indonesia*, Kyoto: Centre for Southeast Asian Studies.
- Matthes, B.F., 1875, *Kort verslag aangaande alle mij in Europa bekende Makassaarsche en Boeginesche handschriften, vooral die van het Nederlandsch Bijbelgenootschap te Amsterdam*, Amsterdam: Nederlandsch Bijbelgenootschap.
- Meilink-Roelofs, M.A.P., 1962, *Asian trade and European influence in the Indonesian archipelago between 1500 and about 1630*, The Hague: Nijhoff.
- Millar, S.B., 1983, 'On interpreting gender in Bugis society', *American Anthropologist* 3:477-93.
- , 1989, *Bugis weddings; Rituals of social location in modern Indonesia*, Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies.
- Mills, J.V., 1974, 'Arab and Chinese navigators in Chinese waters in about A.D. 1500', *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 47:1-82.
- Mukhlis (ed.), 1985, *Sejarah daerah tk.II Sidenreng-Rappang*, Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Niemann, G.K., 1883, *Geschiedenis van Tanette*, 's-Gravenhage: Nijhoff.
- Noorduyn, J., 1955, *Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo': Buginese historiografie*, The Hague: Smits.
- , 1965, 'Origins of South Celebes historical writing', in: Soedjatmoko et al., *An introduction to Indonesian historical writing*, Ithaca: Cornell University Press.
- Nooy-Palm, H., 1979, *The Sa'dan-Toraja; A study of their social life and religion*, The Hague: Nijhoff.
- Pelras, C., 1971, 'Hierarchie et pouvoir traditionnels en pays Wadjo [Part 2]', *Archipel* 2:197-223.
- , 1977, 'Les premieres donnees occidentales concernant Celebes-Sud', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 133:227-60.

- , 1979, 'L'oral et l'ecrit dans la tradition Bugis', *Asie du sud-Est et le Monde Insulindien* 10:272-9.
- Pigeaud, Th.G.Th., 1962, *Java in fourteenth century; A study in cultural history*, Volume 3, The Hague: Nijhoff.
- Reid, A., 1983, 'The rise of Makassar', *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 17:117-60.
- Roux, C.C.F.M., le, and A.A. Cense, 1935, 'Boegineesche zeekarten van den Indischen Archipel', *Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap* 52:687-714.
- Sahlins, M.D., 1963, 'Poor man, rich man, big man, chief; Political types in Melanesia and Polynesia', *Comparative Studies in Society and History* 5:285-303.
- Schurhammer, G., 1980, *Francis Xavier; His life, his times*, Volume 3, *Indonesia and India 1545-1549*, Rome: Jesuit Historical Institute.
- Skinner, Q., 1989, 'The state', in: T. Ball, J. Farr and R.L. Hanson (eds), *Political innovation and conceptual change*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Solyom, G., and B. Solyom, 1978, *The world of the Javanese Keris*, Honolulu: East-West Center.
- Speelman, C., 1670, 'Notitie dienende voor eenem korten tijd en tot nadir last van de Hoge Regering op Batavia voor den ondercoopman Jan van Oppijnen', Type-script copy held in the Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden.
- Stavorinus, J.S., 1798, *Voyages to the East-Indies; by the late John Splinter Stavorinus Esq. Rear Admiral in the Service of the States-General. Translated from the original Dutch by Samuel Hill Wilcocke. With notes and additions by the translator*, Volume 2, London: G.G. and J. Robinson.
- Takaya Y., 1984, 'two sago villages in South Sulawesi', in: N. Maeda and Mattulada (eds), *Transformation of the agricultural landscape in Indonesia*, Kyoto: Center for Southeast Asian Studies.
- Wolhoff, G.J., and Abdurrahim (eds), 1959, *Sedjarah Gowa*, Ujung Pandang: Jajasan Kebudajaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Wolters, O.W., 1982, *History, culture and region in Southeast Asian perspectives*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Wood, M., 1985, *In search of the Trojan War*, London: Guild Publishing.
- Zainal Abidin, Andi, 1983, 'The emergence of early kingdoms in Sulawesi', in: Andi Zainal Abidin, *Persepsi orang Bugis, Makassar tentang hukum, negara dan dunia luar*, Bandung: Penerbit Alumni.
- , 1985, *Wajo' pada abad XV-XVI; Suatu penggalian sejarah terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara'*, Bandung: Alumni.
- Zerner, C., 1981, 'Signs of the spirits, signature of the smith; Iron forging in Tana Toraja' *Indonesia* 31:89-112.